

RINGKASAN

M.Mahdi Hasan, 2025, NIM 233410061, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panca Marga Probolinggo, **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-Alun Kabupaten Gresik**, Dosen Pembimbing I: Dr.Hj.Siti Marwiyah, M.Si, Dosen Pembimbing II: Eko Yudianto Yunus, S.Sos., M.AP. 79 hal + xiii.

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu penting dalam pengelolaan tata ruang kota, terutama di area publik seperti alun-alun. Pemerintah Kabupaten Gresik telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 sebagai langkah untuk menata dan memberdayakan PKL, dengan tujuan tidak hanya menciptakan ketertiban dan kebersihan lingkungan, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut, sejauh mana regulasi diterapkan, serta tantangan yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda No. 07 Tahun 2013 belum optimal. Terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan yang ditetapkan secara normatif dan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, resistensi dari para PKL, serta lemahnya pengawasan. Selain itu, sosialisasi mengenai kebijakan ini masih terbatas, sehingga banyak PKL yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks penataan. Meskipun demikian, pemerintah daerah telah berupaya menciptakan pendekatan yang lebih persuasif dan dialogis sebagai strategi alternatif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan efektivitas penataan.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur yang terlibat, serta partisipasi aktif komunitas PKL dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, penataan PKL di Alun-Alun Gresik diharapkan tidak hanya menjadi simbol keteraturan tata kota, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan yang adil.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima, Alun-Alun Gresik.